

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Dalam sebuah penelitian yang salah satunya seperti sebuah karya yang ditulis dalam bentuk skripsi, tidak ada yang bersifat mutlak asli dan benar-benar baru dihasilkan oleh seorang penulis maupun peneliti, dimana penelitian tersebut tidak terlepas dari pengaruh penelitian yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyadari pentingnya melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang digarap.

Pada literatur review ini penulis akan berfokus terhadap literasi yang relevan dan memiliki korelasi dengan pembahasan dalam penelitian ini. Untuk melihat penelitian terdahulu, penulis mengajukan empat penelitian terdahulu, literatur pertama berjudul **“Alasan Tiongkok Menghentikan Impor Sampah Plastik Polietilena Tereftalat (PET) Tahun 2018”** oleh A.A Gede Agung Bharata, D.A Wiwik Dhamiasih dan A.A Bagus Surya Widya Nugraha.

Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa kebijakan Tiongkok dalam menghentikan impor sampah yang masuk ke negaranya, merupakan bentuk Tiongkok dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya dan menjaga keamanan lingkungannya. Dengan menghentikan sampah impor Tiongkok tidak akan berdampak pada pasokan bahan baku untuk produksi polyester karena Tiongkok sendiri memiliki sampah plastik yang masif. Namun larangan impor sampah ini

justru berdampak positif terhadap kerugian materi maupun sumber daya manusia yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan penyakit akibat polusi.

Untuk itu kebijakan yang dikeluarkan oleh China merupakan kebijakan yang rasional, sebagai negara yang ingin memberikan perlindungan dan menjaga keamanan bagi lingkungan dan masyarakatnya. Selain itu dengan adanya kebijakan tersebut membantu Tiongkok dalam mengurangi permasalahan sampah plastic yang harus di daur ulang, serta mengurangi biaya yang dikeluarkan Tiongkok untuk melestarikan lingkungan maupun kesehatan yang berdampak dari sampah plastik.

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas kebijakan larangan impor yang dikeluarkan oleh China dan dampak sampah impor bago lingkungan hidup. namun penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang mana penelitian diatas hanya membahas mengenai alasan China menghentikan impor sampahnya. Sedangkan penulis membahas mengenai kebijakan sampah impor yang dikeluarkan China yang berdampak pada peningkatan sampah impor di Indonesia.

Literatur selanjutnya berjudul **“Respon Australia terhadap Kebijakan Larangan Impor Sampah China (*Global Shifting Limbah Australia*)”** oleh Jessica Deviana Utami Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Dalam literatur tersebut menjelaskan mengenai kebijakan larangan sampah impor China melalui *Green Fence*, *National Sword Policy*, dan *Sky Blue* yang berdampak terhadap limbah di Australia.

Menurut Negara Australia sendiri penerapapan serangkaian kebijakan yang dibuat oleh China, sangat mempengaruhi negara-negara pengekspor khususnya

Australia sendiri, sebab mereka harus memolah sampahnya sendiri. Untuk mengatasi permasalahan limbah sampah di negaranya, Australia membuat serangkaian regulasi seperti *The 2018 National Waste Policy* dan juga membuat jadwal larangan ekspor sampah, plastic, kertas dan ban.

Walaupun penelitian tersebut sempat terhalang karena adanya pandemic, namun pada akhirnya kebijakan Australia disahkan pada Januari 2021. Rencana aksi kebijakan limbah nasional yang ditetapkan oleh Australia ini diharapkan dapat memberikan dampak positif serta bermanfaat bagi perekonomian Australia. Sebab melalui tidak adanya ekspor sampah tersebut dapat membuat lapangan pekerjaan yang baru, dengan begitu setiap 10.000 ton limbah yang didaur ulang yang dilakukan negaranya akan menghasilkan 9,2 persen pekerjaan baru dibandingkan sebelumnya.

Dalam literatur diatas menjelaskan bahwa dengan adanya larangan impor sampah China melalui *Green Fence*, *National Sword Policy*, dan *Blue Sky*, berdampak bagi Australia selaku negara pengekspor sampah. Namun respon Australia dengan adanya kebijakan larangan sampah impor, sejauh ini Australia menanggapi dengan tenang. Terlebih dengan adanya kebijakan Australia yang melarang ekspor sampah, menurutnya kebijakan China membuatnya membuka lapangan kerja baru di dalam negaranya. Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penulis yaitu membahas mengenai kebijakan larangan sampah impor China yang berdampak bagi negara-negara lain. Namun perbedaannya dengan penelitian penulis, didalam literatur ini Australia berperan sebagai pengekspor sedangkan Indonesia merupakan negara pengimpor.

Literatur ketiga berjudul **“Analisis Dampak Impor Sampah Plastik Terhadap Masyarakat Indonesia dan Lingkungan Hidup Indonesia”** oleh Mei Isyirin dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kegiatan sampah impor yang dilakukan oleh Indonesia, bukanlah hal yang baru sebab kegiatan ini telah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Selain itu sampah impor yang dilakukan oleh Indonesia disebabkan oleh kebutuhan industri seperti makanan dan minuman.

Pengimporan sampah dilakukan sebagai kepentingan negara pengekspor untuk menghiangkan jejak sampah plastic di negaranya. Nampaknya pengolahan sampah plastik membutuhkan biaya yang sanagat besar dan tidak menguntungkan bagi pengusaha dan industrialis. Oleh karena itu negara-negara pengekspor mengatasi limbah mereka dengan melakukan ekspor ke negara pengimpor, termasuk limbah yang tidak dapat didaur ulang, sehingga sampah tersebut menumpuk dan tidak dapat dipakai.

Dalam literature tersebut menjelaskan bahwa dampak-dampak yang dialami oleh Indonesia dengan adanya impor sampah tersebut. Dengan adanya sampah impor dan kurnagnya terknologi yang dimiliki Indonesia ini, berakibat bagi para pemulung karena mereka akan kehilangan pangsa pasarnya karena tidak dapat menjual sampahnya kepada industri daur ulang. Lalu sampah plastic mengandung B3 yang mana dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan juga dapat mencemari lingkungan hidup.

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penulis yaitu membahas mengenai sampah impor yang berdampak bagi lingkungan hidup di Indonesia. Sampah impor ini tidak hanya mengganggu lingkungan, tetapi juga kesehatan

manusia. Lalu perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih berfokus terhadap implementasi kebijakan yang dibuat oleh China terhadap sampah impor, yang berdampak bagi Indonesia. Sedangkan penelitian diatas berfokus terhadap analisis dampak sampah impor yang dilakukan Indoensia saja, tidak mengkorelasikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh China.

Literatur keempat berjudul “**Ancaman Impor Sampah Terhadap Indonesia**” dalam Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Oleh Teddy Prasetiawan. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai sampah impor di Indonesia akhir-akhir ini mengalami kenaikan. Yang pada akhirnya membuat Indonesia mengirim kembali lima kontainer yang masuk dari Jawa Timur ke negara asalnya Amerika Serikat. 65 kontainer yang didalamnya mengandung limbah impor yang terdeteksi mengandung B3.

Sebagian pihak mengaitkan kejadian ini sebagai dampak dari kebijakan pemerintah China yang dikeluarkan sebagai bentuk pengurangan sampah impor secara drastis pada tahun 2018 sehingga negara eksportir sampah mencari negara tujuan baru, terutama ke kawasan Asia Tenggara. Dengan ini akan berdampak pada kenaikan sampah impor yang akan semakin meningkat di Indonesia. Untuk itu Indonesia harus membuat upaya-upaya yang harus dilakukan guna mengatasi kenaikan sampah impor yang masuk ke Indonesia.

Karena kedepannya impor sampah B3 bertanggung jawab penuh terhadap limbah yang diimpor, maka dari itu pemerintah harus mampu dan bertanggung jawab terhadap pengawasan dengan segala komsekuensi apapun. Selain itu impor sampah yang mengandung sampah plastic atau sampah B3 dapat mengancam

terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini mengantisipasi pada pemerintah untuk membuat kebijakan serta peringatan terhadap impor sampah Indonesia.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis membahas dampak sampah impor di Indonesia yang disebabkan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh China dalam pengurangan sampah impor secara drastic. Namun penelitian ini juga memiliki perbedaan yang mana penelitian diatas tidak berfokus pada *national sword policy* tetapi secara umum yaitu kebijakan China terhadap sampah impor.

2.2 Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah dalam proses penelitian, maka diperlukan suatu landasan konseptual untuk memperkuat suatu analisa. Untuk itu dalam melakukan suatu penelitian dan analisa masalah yang penulis angkat, diperlukan landasan berupa teori maupun konsep yang relevan. Dengan adanya kerangka konseptual maka akan mempermudah penulis dalam menganalisa suatu masalah dan menghasilkan jawaban yang konsisten.

Hubungan Internasional erat kaitannya dengan berbagai bentuk interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional, mulai dari aktor negara sampai dengan individu. Penelitian hubungan internasional mencakup studi tentang kebijakan luar negeri atau politik internasional, yang mencakup semua hubungan dan interaksi yang berlangsung dalam konteks internasional, termasuk perdagangan internasional, pertukaran budaya, pariwisata, komunikasi serta pengembangan nilai dan etika internasional.

Pengertian Hubungan Internasional menurut **Mc. Clelland** dalam buku **Pengantar Ilmu Hubungan Internasional** oleh Anak Agung Banyu Perwita, bahwa hubungan internasional adalah sebagai berikut :

“Hubungan internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara jenis entitas sosial tertentu, termasuk interaksi sekitar yang relevan yang melibatkan berbagai bentuk interaksi antara masyarakat dengan pemerintah atau warga negara dari berbagai negara. Selain itu, hubungan internasional merupakan segala bentuk yang berkaitan dengan politik luar negeri dan politik internasional, termasuk semua hubungan antar negara dan negara di dunia”. (Perwita, 2014)

Dengan demikian hubungan internasional merupakan segala bentuk yang mengacu kepada segala interaksi yang melibatkan aktor internasional, bentuk interaksi tersebut dilakukan oleh pemerintah hingga warga negara. Interaksi tersebut yang pada akhirnya mengacu pada politik luar negeri dan politik internasional. Dapat disimpulkan bahwa interaksi tersebut mengacu pada perilaku para aktor negara maupun non-negara, perilaku ini dapat berwujud kerjasama, aliansi, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.

Menurut **Rosenau**, Kebijakan luar negeri memiliki pengertian yaitu sebagai berikut: **“Kebijakan luar negeri adalah upaya suatu negara untuk memperoleh dari lingkungan eksternalnya melalui sikap aktivitasnya secara keseluruhan. Kebijakan luar negeri bertujuan untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup suatu negara”.** (Mochamad, 2007)

Kebijakan luar negeri akan menghasilkan suatu kebijakan yang akan menjadi suatu tindakan suatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya dalam mewujudkan kepentingan nasional. Sama halnya dengan kebijakan China

melalui *National Sword Policy*, ini bertujuan untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya dalam menjaga lingkungan dan kehidupan warga negaranya terhadap sampah-sampah yang dapat mengganggu terhadap lingkungan negaranya. Untuk itu China meratifikasi kebijakan nasional mengenai impor sampah yang masuk kenegeranya. Karena China menilai, bahwa sampah impor tersebut telah mencemari lingkungannya.

Menurut **Jeffry A Frieden dan David A. Lake** dalam buku *International Political Economy* menjelaskan bahwa ekonomi politik internasional adalah studi tentang interaksi antara ekonomi dan politik di ranah internasional. dalam pengertian yang paling umum, ekonomi dapat didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi dan penggunaan kekayaan, sedangkan politik adalah seperangkat institusi dan aturan yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi. Ekonomi politik memiliki berbagai arti yang terutama mengacu pada studi tentang dasar politik tindakan ekonomi, cara kebijakan pemerintah mempengaruhi fungsi pasar. Disisi lain yang paling utama adalah dasar ekonomi dari tindakan politik. bagaimana kekuatan ekonomi membentuk kebijakan pemerintah, karena keduanya saling melengkapi.

Menurut **Mochtar Mas'oeed** Ekonomi Politik adalah **“Ekonomi politik berfokus pada studi tentang hubungan dan interaksi antara fenomena politik dan ekonomi, antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik dan internasional, dan antara pemerintah dan masyarakat”**. (Sudirman, 2021)

Secara singkat, ekonomi politik internasional adalah studi mengenai hubungan timbal balik antara ekonomi internasional dan politik internasional, yang

disebabkan oleh berkembangnya masalah dalam sistem internasional. studi ekonomi politik internasional membutuhkan integrasi teori dan adanya disiplin politik.

Menurut **Robert Gilpin**, ekonomi politik dalam buku Anak Agung Banyu Perwita yang berjudul “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional” sebagai berikut :

“Ekonomi politik internasional merupakan interaksi global yang dinamis, antara pengejaran kekuasaan dalam konteks politik dan kekayaan dalam konteks ekonomi, yang menghasilkan hubungan timbal balik antara ekonomi dan politik. Untuk itu negara dan pasar berinteraksi untuk mempengaruhi distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam hubungan internasional” (Perwita, 2014).

Dalam hal tersebut, yang dilakukan oleh China dalam melakukan sampah impor dari negara-negara lain, yang sampai akhirnya mengeluarkan kebijakan larangan impor sampah di negaranya. China dan Indonesia sendiri melakukan sampah impor, pada awalnya memikirkan *benefit* yang didapat melalui sampah-sampah tersebut, yang dapat mereka olah kembali menjadi bahan baku baru. Dengan adanya sampah tersebut mereka dapat meminimalisir modal mereka dan dapat memiliki keuntungan lebih. Tanpa mereka sadari impor sampah tersebut merugikan bagi negaranya karena adanya tumpukkan sampah dan mencemari lingkungan, akhirnya China mengeluarkan kebijakan mengenai larangan impor sampah.

Larangan impor yang dilakukan oleh China merupakan bagian dari salah satu tindakan terkait perdagangan seperti kebijakan pembatasan perdagangan, biaya masuk, serta pembatasan transaksi keuangan yang terjadi antar negara. hal ini juga

merupakan pemahaman umum tentang sanksi ekonomi. Menurut Smeets, tindakan yang termasuk kedalam larangan impor antara lain tindakan boikot dan embargo, boikot merupakan tindakan menolak untuk membeli barang atau jasa dari pihak pemasok.

Larangan impor menurut Drezner adalah **“Negara yang diberikan sanksi atau yang memboikot impornya dapat mengalihkan eksportnya ke negara lain atau ke negara ketiga kemudian memotong control pihak bea cukai”** (Drezner, 1998).

Meskipun larangan impor yang diberlakukan oleh China masih merupakan bagian dari lingkup sanksi ekonomi berupa boikot, namun ada perbedaan dengan apa yang dilakukan China terhadap sampah impor bukanlah kebijakan yang dibuat untuk kepentingan politik melainkan untuk kepentingan yang menyangkut lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup masyarakatnya.

Selain itu, penerapan kebijakan larangan impor sampah China ini akan mempengaruhi negara lain, baik negara pengimpor maupun negara pengekspor. Dalam hal ini Indonesia merupakan cerminan dari teori transfer global. Globalisasi adalah pemikiran dan prediksi dari Karl Marx yang berpengaruh signifikan terhadap teori *global shift*. Salah satu efeknya dari globalisasi yaitu munculnya *hyper-globalis* yang percaya bahwa manusia hidup didunia tanpa batas dimana istilah negara tidak lagi relevan. Pandangan strukturalis percaya bahwa globalisasi bukanlah solusi melainkan masalah pasar bebas yang menciptakan ketidakadilan. Globalisasi merupakan pertukaran pandangan terhadap dunia melalui proses integrasi internasional, proses ini melibatkan banyak hal mulai dari ekonomi,

budaya, kebijakan pemerintah, teknologi dan sebagainya. Melalui integrasi tersebut menjadikan terciptanya suatu ketergantungan dalam hal ekonomi dan budaya, sama halnya dengan kasus impor sampah yang dilakukan China yang berdampak terhadap negara-negara lain. Sederhananya, teori ini didasarkan pada keberadaan pertukaran bahan di negara *periphery* yang merupakan negara yang memiliki bahan baku, lalu di olah menjadi produk di negara *core* yang nantinya dijual kembali dalam bentuk barang ke negara *periphery* (Roberts, 2012).

Begitu pula halnya yang terjadi diantara China dengan negara-negara eksporter, dengan adanya ekspor sampah ini menjadikan terciptanya ketergantungan oleh kedua belah pihak. Disatu sisi China membutuhkan sampah impor untuk didaur ulang menjadi bahan mentah lalu barang tersebut di ekspor menjadi barang baru. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan larangan impor sampah oleh China, membuat negara-negara yang terbiasa mengekspor sampahnya ke China menjadi terganggu dan akhirnya mencari alternative negara lain, salah satunya Indonesia.

Penerapan larangan dan adanya pembatasan sampah impor limbah padat merupakan sebuah bentuk penerapan pembangunan dan menjaga kesehatan manusia. Menteri Luar Negeri China juga mengatakan bahwa pembatasan dan pelarangan impor limbah padat merupakan langkah penting yang diambil oleh China. Selain itu larangan sampah yang diambil oleh China ini sudah diatur dalam Konvensi Basel mengenai pengendalian pergerakan lintas batas limbah berbahaya, yang mana bahwa setiap negara berhak untuk melarang secara langsung limbah berbahaya asing yang masuk ke negaranya (Daily, 2018).

Awalnya pada tahun 2010, China mulai mengesahkan kebijakan tegasnya terhadap limbah asing. Kemudian pada tahun 2013, China tidak menerapkan *Operation Green Fence* yang mana didalamnya terdapat peraturan mengenai pembatasan sampah impor limbah yang sudah terkontaminasi. *Operation Green Fence* berhasil mencapai tujuannya dalam membatasi perdagangan sampah legal. Walaupun dinilai berhasil melalui *Operation Global Fence* yang justru bukan menghentikan tetapi malah meningkatkan arus sampah asing illegal yang masuk ke China. Maka China pun mengeluarkan kebijakan baru pada tahun 2018, yaitu *National Sword Policy* yang bertujuan melarang impor limbah padat dimana kebijakan tersebut melarang 24 jenis sampah impor. Kementerian Ekologi dan Lingkungan China (MEE) mengatakan bahwa melarang 32 jenis bahan bekas atau limbah padat. Kebijakan tersebut diikuti dengan adanya kebijakan *Blue Sky Operation* China yang merupakan kebijakan yang condong mengurangi polusi dan mendorong para pendaur ulang, untuk mengurangi pelonjakan terhadap sampah domestic yang melonjak (Ripley, 2018).

Dengan adanya *National Sword Policy* bersamaan dengan *Blue Sky* yang dikeluarkan oleh China ini menjadikan beberapa negara kebingungan mengolah sampah mereka. Belum lagi, kebijakan tersebut menjadikan para pencemar mendapatkan sanksi dengan adanya penetapan sistem harga nasional untuk emisi pencemaran air dan emisi karbon. Dapat disimpulkan bahwa China memiliki permasalahan sampah yang merupakan salah satu masalah utama mereka, untuk itu dalam melindungi lingkungannya China mengeluarkan kebijakan diatas.

Dalam kebijakan ini Indonesia mengalami dampak yang signifikan pada tahun 2018 mengenai sampah impor limbah padat yang masuk ke negaranya. Selain

itu, peraturan mengenai sampah impor yang masuk di Indonesia telah tertera dalam Undang Undang.

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan :

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”

Pemaknaan diatas termsuk limbah padat yang dikataegorikan sebagai limbah B3 berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Dalam penjelasan diatas telah ditegaskan bahwa limbah ini sangat berbahaya, namun lebih tegas dan jelas disebutkan dalam Undang-Undag sebagai berikut.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah pada Pasal 29 Ayat (1) huruf a dan b, menyatakan :

“Memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mengimpor sampah; c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;”

Disini disampaikan secara jelas bahwa permasalahan mengenai samapah impor di Indonesia dinyatakan sebagai kegiatan yang illegal. Namun justru peraturan menteri yang memberikan celah dan melegalkan terhadap praktik sampar impor di Indonesia. Sebenarnya sampah impor diperbolehkan apabila pengolahannya memenuhi standard yang ada, sedangkan di Indonesia sendiri

dalam pengolahan sampah domestic masih terbilang kurang. (Novaradila et al., 2020)

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan anggapan dasar atau asumsi dasar dari suatu penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang bersifat praduga atau asumsi dan harus dilakukan pengujian untuk membuktikan kebenarannya. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Dengan adanya larangan impor sampah melalui *National Sword Policy* yang dikeluarkan China terhadap kegiatan impor sampah, maka impor sampah di Indonesia akan semakin meningkat, hal ini ditandai dengan meningkatnya limbah padat yang masuk ke Indonesia”.**

2.4 Operasional Variabel dan Indikator Hipotesis

Tabel 2. 1 Operasional Variabel dan Indikator Hipotesis

Variabel Dalam Hipotesis	Indikator	Verifikasi
Variabel Bebas: Dengan adanya larangan impor sampah melalui <i>National Sword Policy</i> yang dikeluarkan China terhadap	1. Alasan China memberlakukan larangan impor sampah limbah padat	1. Teracamnya lingkungan dan kesehatan yang dihasilkan oleh daur ulang limbah padat di China. Sumber :

<p>kegiatan impor sampah</p>		<p>https://www.researchgate.net/publication/342132901_ANALISIS_EKSPOR_DAN_IMPORT_LIMBAH_PADAT_ANTARA_CINA_DAN_AMERIKA_SERIKAT_OPERATION_GREEN_FENCE_2013_DAN_OPERATION_NATIONAL_SWORD_2018_ANALYSIS_OF_SOLID_WASTE_EXPORTS_AND_IMPORTS_BETWEEN_CHINA_AND_THE_UN</p>
	<p>2. China berupaya menjaga dan membatasi sampah impor yang telah terkontaminasi melalui <i>Operation Green Fence</i></p>	<p>2. Kebijakan yang dikeluarkan dalam upaya menegakkan peraturan impor yang dikeluarkan pada tahun 2010.</p> <p>Sumber :</p> <p>https://resource-recycling.com/recycling/2018/02/13/green-fence-red-alert-china-timeline</p>
	<p>3. China mengumumkan larangan impor terhadap 24 jenis limbah padat melalui <i>National Sword Policy</i>.</p>	<p>3. Kebijakan yang diumumkan oleh China dalam upaya melindungi lingkungan negaranya.</p> <p>Sumber :</p> <p>https://www.jurnas.com/artikel/44152/China-Perluas-Larangan-Import-Limbah-Padat/</p>

	4. China mengumumkan kebijakan <i>Blue Sky</i> .	4. Adanya kebijakan <i>Blue Sky</i> merupakan rencana pencegahan dan pengendalian udara yang disebabkan oleh pengolahan sampah padat Sumber : https://www.icis.com/explore/resources/news/2018/07/10/10239565/chinas-final-blue-sky-plan-could-boost-costs-production-curbs/
Variabel Terikat: maka impor sampah di Indonesia akan semakin meningkat, hal ini ditandai dengan meningkatnya limbah padat yang masuk ke Indonesia	1. Beberapa negara importer beralih mengimpor sampahnya ke Indonesia	1. Data BPS menunjukkan peningkatan impor sampah pada tahun 2018 Sumber : https://www.nexus3foundation.org/single-post/2019/03/22/situasi-ekspor-dan-impor-sampah-plastik-di-indonesia-implikasi-dari-kebijakan-national-sw
	2. Masuknya Impor sampah dari Amerika Serikat ke Indonesia	2. Pelanggaran importer sampah B3 Sumber : https://www.dw.com/id/kala-indonesia-jadi-surga-pembuangan-sampah-negara-maju/a-49232628

	<p>3. Sampah plastic menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan</p>	<p>3. Kandungan sampah impor yang mengandung bahan berbahaya dan beracun</p> <p>Sumber :</p> <p>https://www.ugm.ac.id/id/berita/17999-impur-sampah-perlu-dihentikan</p>
	<p>4. Kebijakan sampah impor Indonesia</p>	<p>4. Kurang efektifnya kebijakan sampah impor di Indonesia.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://www.kompasiana.com/masykur_ideas/5d5e25e1097f364a605e0262/impur-sampah-dan-lemahnya-kebijakan-pemerintah?page=1&page_images=1</p>

2.5 Skema Penelitian dan Alur Penelitian

